

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi Dan Informatika pada dasarnya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang aktif mengoptimalkan penyebaran informasi melalui TIK pada 5 (lima) tahun ke depan dimana informasi yang disampaikan merupakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

Informasi melalui TIK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat sehingga perlu dibangun ke depan dalam skala prioritas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pengembangan TIK merupakan issue strategis pada 5 (lima) tahun ke depan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau, ada 3 tugas pokok yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Dan Informatika yaitu menyelenggarakan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Dalam Urusan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ada 2 (dua) tugas utama yang harus dilakukan, yaitu :

1. Peningkatan akses informasi dan komunikasi bagi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta bagi masyarakat.

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu up to date dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini. Untuk itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau akan terus aktif meningkatkan akses informasi melalui layanan online berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK). Adapun akses informasi yang sudah ada adalah situs resmi.

(website) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau yang beralamat di www.lamandaukab.go.id, dan beberapa situs resmi OPD Pemda Kabupaten Lamandau lainnya. Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi, dan memberikan ruang gerak bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses

pemerintahan dan pembangunan.

Adapun yang menjadi faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini adalah :

a. Faktor Pendorong :

Telah terbentuknya OPD khusus (Dinas Komunikasi Dan Informatika) yang menangani TIK;

b. Faktor penghambat :

- 1) Tidak tersedianya anggaran yang cukup memadai;
- 2) Sarana dan Prasaran yang kurang memadai;
- 3) Masih perlu adanya penambahan sumber daya manusia.

2. Penyebarluasan Informasi Pemerintah dan Pembangunan Daerah

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamandau sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat secara formal maupun informal, untuk mendapatkan feed back sehingga kebijakan yang diambil tersebut dapat dirasakan masyarakat, dan bisa betul-betul sampai kepada tujuan yang ingin dicapai.

Selama ini sosialisasi kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan dengan sistem tradisional, yang notabene selalu menggunakan media kertas, layar dan media cetak lainnya. Namun dengan memasyarakatnya teknologi informasi melalui media digital internet, maka penyebarluasan informasi menjadi semakin cepat dan efektif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memanfaatkan sarana cetak lainnya berupa majalah, baliho, spanduk, leaflet, brosur dan lainnya yang semuanya dilakukan dengan perangkat TIK. Adapun faktor pendorong dan penghambat dalam kegiatan ini diantaranya :

a. Faktor Pendorong :

- 1) Adanya pemanfaatan teknologi yang mendukung sosialisasi pembangunan;
- 2) Tersedianya layanan internet untuk mendukung penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

b. Faktor Penghambat :

- 1) Fasilitas penunjang informasi dan komunikasi yang masih terbatas;
- 2) Perlunya peningkatan kerjasama dan dukungan dari berbagai OPD dalam penyampaian informasi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH

Sebelum menetapkan Visi, Misi dan Program Kerja Dinas, maka perlu dikaji secara mendalam Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati) terpilih yang dimuat dalam RPJMD 2018-2023.

Berdasarkan naskah RPJMD Kabupaten Lamandau 2018-2023, Visi, Misi, dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi	Misi
<i>BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Cerdas, Sehat dan Sejahtera.3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan dan Kelestarian Lingkungan Hidup.4. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Beroral, Religius dan Aman Berdasarkan Nilai Nilai dan Kearifan Budaya Lokal.5. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : BERGERAK CEPAT MEMBANGUN KABUPATEN LAMANDAU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MENUJU KABUPATEN LAMANDAU JUARA (Jujur, Unggul, Adil, Religius dan Aman)				
No	Misi Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
	Fokus Program :			
	Meningkatkan serta mengoptimalkan konsep tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik (<i>good governance</i>) sebagai bagian dari reformasi birokrasi dalam bentuk reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat untuk memantapkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan menghasilkan pelayanan public yang lebih baik dan lebih jelas tolak ukurnya.	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya Rencana Induk Tata Kelola TIK - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat - Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil. - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum adanya aturan baku / standarisasi yang mengatur urusan di bidang komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll. - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik. - Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik. - Kebutuhan akan pengembangan muatan e-Government.

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, tampak jelas bahwa hasil akhir yang diharapkan dari seluruh rangkaian perencanaan pembangunan Kabupaten Lamandau adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau juara (jujur, unggul, adil, religius dan aman).

Pemerintahan yang baik merupakan keinginan masyarakat yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik yang baik, hal tersebut menekan pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan yang optimal, karena bersamaan dengan peningkatan pengetahuan dan keberanian masyarakat harus diimbangi pula dengan perubahan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

3.3 TELAAHAN RENSTRA PROVINSI

Sebagaimana disebutkan dimuka, Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamandau Tahun 2018 – 2023. Sedangkan dalam skala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Renstra merupakan Acuan dari bidang-bidang dan bagian dalam Dinas Komunikasi Dan Informasi untuk menyusun rencana kerja tahunan.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Sasaran Jangka Mengengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi/Kabupaten / Kota	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		- Belum adanya Rencana Induk - Tata Kelola TIK	- Terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan terampil.	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, sandi dan statistik.
2		- Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	- Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum adanya aturan baku/standarisasi yang mengatur urusan di bidang	- Kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan publik.
3		- Belum optimalnya penyebarluasan informasi kepada masyarakat		- Kebutuhan akan pengembangan

4		<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadinya kesenjangan dibidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (<i>digital device</i>) di masyarakat khususnya antara kota dan desa. 	komunikasi, informatika, sandi dan statistik seperti website pemerintah dan SKPD, hosting, colocation, dll. <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD 	muatan Government. e-
---	--	---	--	-----------------------

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Berdasarkan tugas dan fungsi dinas komunikasi dan informatika telaahan RTRW dan KLHS tidak langsung berhubungan dengan pelayanan OPD.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-Isu strategis yang akan dihadapi pada rentang waktu tahun 2018-2023 antara lain :

1. Tata Kelola

Penerapan Teknologi Informasi di lingkungan Kabupaten Lamandau digerakkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yang sekaligus sebagai penanggung jawab tata kelola TI dan *e-Government* di Kabupaten Lamandau. Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Kebijakan

Dalam memberikan kekuatan dan payung hukum dalam menyelenggarakan TIK di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau, perlu dibuat kebijakan TIK berupa Peraturan Daerah atau Peraturan

Bupati tentang penyelenggaraan TIK dan Tata Kelola TIK. Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamandau belum memiliki kebijakan tentang tata kelola dan penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK. Penggunaan TIK di instansi pemerintahan masih sebatas kebutuhan setiap OPD, dan mengikuti kebutuhan dari pemerintah pusat. Sehingga penyelenggaraan pemerintah TIK belum berbasis strategi dan perencanaan yang baik dan masih bersifat sporadis dan silo-silo.

3. Kompetensi SDM

Untuk menunjang penerapan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau dibutuhkan kompetensi SDM khususnya di bidang TIK. Sebagian besar OPD belum memiliki operator TIK yang memiliki kompetensi khusus di bidang TIK. Dinas Kominfo Kabupaten Lamandau sebagai OPD yang masih baru, saat ini memiliki 7 orang pelaksana, dan 23 tenaga harian lepas yang bertugas membantu operasional di masing-masing bidang. Namun ditinjau dari sisi kompetensi, masih perlu melakukan peningkatan kompetensi SDM terutama yang berhubungan dengan 10 urusan pokok Dinas Kominfo di Pemerintah Daerah.

4. Arsitektur Aplikasi dan Informasi

Aplikasi yang saat ini ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau, adalah aplikasi sistem informasi untuk masyarakat yang berupa web, dan aplikasi internal di setiap OPD. Aplikasi web dapat dikunjungi di alamat <http://Lamandaukab.go.id>. Untuk website OPD-OPD lain, sudah menggunakan sub domain di bawah Lamandaukab.go.id. Website yang ada antara lain website informasi OPD, dan website layanan publik seperti perijinan online, pengaduan masyarakat, informasi lelang dan lainnya. Selain website sistem informasi yang disajikan untuk masyarakat umum dan bisnis, masih terdapat banyak aplikasi internal yang digunakan oleh masing-masing OPD. Aplikasi tersebut berada di masing-masing OPD dan pihak ketiga.

5. Arsitektur Infrastruktur

Infrastruktur jaringan di Pemerintah Kabupaten Lamandau, secara umum masih terkonsentrasi di masing-masing OPD. Setiap OPD mengelola

jaringan LAN masing- masing, dan menyewa jaringan internet masing-masing.

Selain jaringan LAN yang berbasis kabel UTP, di setiap OPD juga menyediakan jaringan hotspot berbasis wireless yang digunakan untuk akses perangkat laptop dan perangkat mobile lainnya. Karena pengelolaan infrastruktur jaringan diserahkan kepada masing- masing, sehingga tidak ada standarisasi penggunaan hardware, konfigurasi dan keamanannya. Jaringan antar OPD masih belum terhubung secara lokal/WAN. Komunikasi antar OPD menggunakan jaringan internet yang disewa masing-masing OPD. Sehingga aplikasi internal dan penggunaan internet menjadi satu melalui bandwidth internet.

Server aplikasi internal OPD saat ini masih dikelola oleh masing-masing OPD. Beberapa aplikasi internal yang berbagi pakai berada dan dikelola sendiri oleh OPD terkait. Sebagai contoh aplikasi SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, SIMDA BMD yang dipakai oleh semua OPD, dikelola oleh Badan Keuangan Daerah.

Dinas Kominfo Kabupaten Lamandau belum sepenuhnya menjalankan tata kelola IT terpusat, dikarenakan masih terkendala di sisi infrastruktur dan SDM pengelolanya. Sebagian besar Server digunakan untuk mengelola website kabupaten, webmail, dan aplikasi layanan kepada masyarakat masih berada di Sekretariat Daerah Selain aplikasi internal, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga memiliki aplikasi yang terkait dengan pemerintah pusat seperti hampir semua aplikasi di Dinas Pendidikan, server aplikasinya dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI. Begitu juga dengan Dinas Sosial dan Dinas Pertanian dan Perikanan juga menggunakan aplikasi yang dikelola oleh kementerian terkait.